

ANALISIS PERAN STATUS SOSIAL EKONOMI DALAM MENGAKSES PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN CIPEUNDEUY

Siti Jenab¹, Lina Aryani², Indra Aditya³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: 2110631180037@student.unsika.ac.id¹

ABSTRAK

Di wilayah pedesaan, aksesibilitas sangat erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Terdapat kesenjangan yang jelas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah maju di Pulau Jawa dan wilayah terpencil di luar Jawa. Di Kecamatan Cipeundeuy, dengan jumlah penduduk 89.155 jiwa dan luas wilayah 101,11 km², terlihat perbedaan tingkat aksesibilitas, khususnya antara Desa Cipeundeuy yang berada di pusat kecamatan dengan Desa Margaluyu yang jaraknya lebih jauh. Kondisi geografis tersebut membatasi mobilitas masyarakat dan menghambat akses terhadap layanan publik penting seperti kesehatan dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran status sosial ekonomi dalam memengaruhi akses terhadap layanan publik di Kantor Kecamatan Cipeundeuy. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teori status sosial ekonomi Horton dan Hunt, penelitian ini menelaah bagaimana pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan berperan dalam aksesibilitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sosial ekonomi yang lebih tinggi tidak secara signifikan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Cipeundeuy, sehingga faktor geografis lebih dominan dibandingkan faktor sosial ekonomi dalam menentukan aksesibilitas.

Kata Kunci: *Status sosial ekonomi, aksesibilitas, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, Kecamatan Cipeundeuy*

ABSTRACT

, In rural areas, accessibility is strongly linked to basic needs, which are indirectly connected to social and economic welfare. A clear disparity exists between urban and rural regions, as well as between the more developed areas of Java and remote regions outside the island. In Cipeundeuy District, with a population of 89,155 and an area of 101.11 km², differences in accessibility are evident, particularly between Cipeundeuy Village, located at the district center, and Margaluyu Village, which is farther away. The geographical distance limits mobility and constrains access to essential public services such as healthcare and education. This study aims to examine the role of socioeconomic status in shaping access to public services at the Cipeundeuy District Office. Employing a qualitative method and the socioeconomic status theory of Horton and Hunt, the research explores how income, occupation, and education influence service accessibility. The findings reveal that higher socioeconomic status does not

significantly enhance community access to public services in Cipeundeuy District, highlighting the dominant role of geographical barriers over socioeconomic factors in determining accessibility.

Keywords: *Accessibility, socio-economic status, social welfare, public services, Cipeundeuy District.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik berperan krusial dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan memfasilitasi akses ke berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur. Disparitas yang signifikan terlihat antara perkotaan dan pedesaan serta antara wilayah yang lebih makmur di Pulau Jawa dengan daerah terpencil di luar Pulau Jawa. Individu dengan status ekonomi yang lebih tinggi lebih mungkin memiliki akses yang lebih baik ke pekerjaan yang layak, sedangkan individu yang kurang beruntung sering kali terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah (Sundari dkk, 2023). Akibatnya, mereka sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses ke layanan publik yang sangat penting.

Ciri-ciri dari kondisi sosial ekonomi yang baik di pedesaan dapat dikenali melalui beberapa faktor yang saling berkaitan. Individu atau kelompok dengan kondisi tersebut umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, serta status sosial yang tinggi yang tercermin dari kehidupan yang sejahtera, seperti kondisi kesehatan masyarakat yang

baik, jenis pekerjaan yang layak, dan kesadaran terhadap lingkungan. Mereka juga memiliki peluang mobilitas sosial ke arah yang lebih tinggi, kepemilikan lahan atau aset pertanian yang luas, serta orientasi terhadap kegiatan ekonomi yang bersifat komersial atau produksi. Selain itu, mereka cenderung memiliki sikap yang terbuka terhadap penggunaan fasilitas kredit dan pekerjaan yang lebih spesifik dan tetap, serta mampu memberikan pendapatan yang stabil (Sundari dkk, 2023).

Dalam ruang pedesaan, aksesibilitas sangat terkait dengan kebutuhan dasar yang secara tidak langsung berhubungan dengan aspek kesejahteraan sosial dan aspek ekonomi. Seperti di Kecamatan Cipeundeuy yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 89.155 jiwa dan luas wilayah 101.11 km², terdapat perbandingan tingkat aksesibilitas desa yang terlihat yaitu antara Desa Cipeundeuy yang berada sekitar 5 menit dari pusat kecamatan dengan Desa Marguluyu dengan jarak 32 menit dari pusat kecamatan. Jarak tersebut menjadi keterbatasan akses yang berdampak pada mobilitas penduduk dan kemampuan mereka untuk mengakses layanan publik seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Aksesibilitas terhadap pelayanan publik, terutama bagi desa-desa yang memiliki beragam status sosial ekonomi, menurut Horton dan Hunt (dalam Soeroso, 2008) Status sosial ekonomi terjadi dalam masyarakat karena jumlah kemampuan yang dihargai dalam masyarakat terbatas dan akibatnya adalah pada ketidakmerataan. Seseorang yang berada dikelas atas ialah seseorang yang telah memperoleh sesuatu yang berharga. Sementara itu, mereka yang tidak memilikinya otomatis menempati masyarakat kelas bawah. Untuk mengukur status sosial ekonomi masyarakat bisa dilihat dari hal yang berharga yaitu pendapatan/kekayaan, pekerjaan, dan pendidikan. Ketersediaan akses yang optimal ke layanan publik merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh masyarakat. Saat desa-desa dengan beragam status sosial ekonomi memperoleh aksesibilitas yang memadai terhadap pelayanan publik, hal ini membuka pintu bagi mereka untuk menjalankan peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan mandiri.

Penelitian ini akan menganalisis apakah status sosial ekonomi masyarakat dapat berperan dan berpengaruh dalam membantu masyarakat mengakses pelayanan publik yang ada di Kantor Kecamatan Cipeundeuy. Dengan menganalisis variabel-variabel seperti jenis pekerjaan, pendapatan, tingkat

pendidikan, dan korelasinya pada struktur geografis wilayah dapat memberikan gambaran dan perspektif yang lebih mendalam mengenai bagaimana status sosial ekonomi memengaruhi individu dalam mengakses pelayanan publik. Melalui studi ini, diharapkan dapat membantu dan mendukung usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip inklusivitas dan keadilan di wilayah Kecamatan Cipeundeuy.

KAJIAN PUSTAKA

Peran dipahami sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang dijalankan individu dalam suatu peristiwa (Poerwodarminta, 1995). Menurut Soerjono Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Artinya, ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia tengah menjalankan perannya. Perbedaan antara kedudukan dan peran lebih ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sebab pada hakikatnya keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung satu sama lain.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (Soeroso, 2008:11) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial merupakan suatu sistem peringkat status dalam masyarakat. Peringkat tersebut menunjukkan adanya dimensi vertikal dalam struktur status sosial. Menurut Horton dan Hunt (Soeroso, 2008:12),

stratifikasi sosial terjadi karena hal-hal yang dianggap bernilai dalam masyarakat jumlahnya terbatas sehingga distribusinya tidak merata. Individu yang berhasil memperoleh sesuatu yang bernilai akan menempati kelas sosial atas, sedangkan mereka yang tidak mendapatkannya secara otomatis berada pada kelas sosial bawah dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun hal-hal yang dianggap bernilai menurut Horton dan Hunt dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Kekayaan atau Pendapatan

Kekayaan dan pendapatan merupakan dua variabel yang saling berkaitan erat. Seseorang dengan pendapatan tinggi secara tidak langsung akan mengalami peningkatan kekayaan. Kedua aspek ini sering dijadikan ukuran dalam menentukan stratifikasi sosial. Dengan demikian, individu yang tergolong kaya cenderung menempati kelas atas dalam masyarakat, sedangkan mereka yang miskin akan berada pada kelas bawah.

b. Pekerjaan

Pekerjaan selama ini dipahami sebagai sarana utama untuk memperoleh pendapatan, namun di sisi lain pekerjaan juga mencerminkan status sosial yang mengandung unsur penghargaan. Karl Marx membedakan hal ini melalui konsep kelas, yakni kelas borjuis sebagai pemilik modal yang mampu menciptakan lapangan kerja

(pengusaha atau kapitalis), serta kelas proletariat sebagai kelompok yang hanya memiliki tenaga untuk ditawarkan dalam bentuk pekerjaan (buruh).

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terbagi ke dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Stratifikasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan dimensi vertikal dalam konsep stratifikasi sosial. Pendidikan menjadi salah satu indikator penting yang dapat memberikan penghargaan atau pengakuan bagi seseorang di masyarakat. Misalnya, individu yang berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi (S1) dan memperoleh gelar sesuai bidang keahliannya, seperti gelar S.E yang menunjukkan kompetensi di bidang ekonomi, secara tidak langsung menempati posisi stratifikasi sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, masyarakat yang hanya menempuh pendidikan menengah (SMP atau SMA), dasar (SD), atau bahkan tidak menyelesaikan pendidikan dasar, cenderung berada pada lapisan stratifikasi sosial yang lebih rendah.

Dalam Gischa (2023), Sheth dan Sisodia menyebutkan dalam karya mereka yang berjudul *The 4 A's of Marketing 2012*, bahwa aksesibilitas didefinisikan sebagai sejauh mana pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan dan menggunakan suatu

produk. Terdapat dua aspek utama dalam konsep aksesibilitas, yaitu ketersediaan dan kenyamanan. Ketersediaan ini merujuk pada faktor-faktor seperti ketersediaan pasokan yang sesuai dengan permintaan, sejauh mana produk disimpan di tempat penyimpanan, dan keterkaitannya dengan produk dan layanan. Sedangkan kenyamanan mencakup faktor-faktor seperti waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk, kemudahan dalam menemukan produk di berbagai lokasi, serta kemasan yang memudahkan dalam penggunaan produk dengan ukuran yang nyaman.

Pelayanan Publik Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan, yang ditujukan bagi setiap warga negara dan penduduk. Pelayanan tersebut mencakup barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Putra, 2020). Meskipun istilah "barang, jasa, dan pelayanan administratif" dalam penjelasannya dianggap sudah jelas, sebenarnya, konsep "barang" tidak merujuk pada barang yang diperdagangkan dalam kehidupan sehari-hari, melainkan pada barang publik (public goods) yang disediakan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, aksesibilitas pelayanan publik adalah usaha-usaha yang mencakup upaya memastikan bahwa layanan tersebut tersedia dengan memadai, mudah diakses oleh masyarakat, dan dapat dimanfaatkan dengan kenyamanan sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik yang efisien dan inklusif.

Terkait dengan penelitian terdahulu, dalam ini terdapat beberapa penelitian terdahulu untuk dikaji dan sebagai pemenuhan pemahaman dalam melakukan penelitian terkait. Pertama, penelitian berjudul "Peran Pemerintah dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik" yang ditulis oleh Meri Enita Puspita Sari pada tahun 2018 merupakan sebuah penelitian yang menggali peran krusial pemerintah dalam pemenuhan prinsip pelayanan publik yang berkualitas, terutama dalam konteks pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan transportasi. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam penyediaan akses pelayanan publik, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kepulauan, di mana akses tersebut seringkali belum optimal. Ketersediaan akses yang memadai ke pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan ketidakmampuan masyarakat untuk mengaksesnya berdampak buruk terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjelaskan bahwa peran pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, sangat penting dalam

memastikan bahwa pelayanan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau kepulauan.

Kedua, penelitian berjudul "Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia" yang dilakukan oleh Firda Silvia Pramashela dan Hadiyanto Abdul Rachim pada tahun 2021 merupakan sebuah kajian mengenai hak-hak penyandang disabilitas dan pelayanan publik di Indonesia. Penelitian ini menyoroti isu penting mengenai stigma negatif yang masih melekat pada penyandang disabilitas dalam masyarakat Indonesia. Meskipun hukum Indonesia menjamin kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas, termasuk hak mereka untuk menerima pelayanan publik yang optimal dan tanpa diskriminasi, penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak fasilitas publik yang belum memadai dalam mendukung aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih belum optimal di sepuluh kota di Indonesia. Temuan ini mendorong perhatian terhadap perbaikan aksesibilitas pelayanan publik dan perlunya langkah-langkah konkrit untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat memanfaatkan hak mereka dalam

menerima pelayanan publik yang layak dan setara.

Ketiga, Penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembuatan Akta Kematian di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar" oleh Erna Suriyani, yang dilakukan pada tahun 2021, merupakan sebuah penelitian yang berfokus pada hubungan antara status sosial ekonomi masyarakat dan tingkat partisipasi mereka dalam program pembuatan akta kematian di wilayah Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kota Kabupaten Banjar. Penelitian ini memiliki signifikansi yang penting dalam konteks administrasi publik dan pelayanan publik, terutama terkait dengan akta kematian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan yaitu dari segi pengetahuan dan pemahan masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam program pembuatan akta kematian. Dengan kata lain, masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan jenis pekerjaan tertentu cenderung lebih aktif dalam mengikuti program pembuatan akta kematian.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang diambil, ada beberapa yang berkaitan dengan judul penelitian saya. Pada penelitian terdahulu yang ketiga, status sosial ekonomi yaitu pada tingkat pendidikan khususnya memiliki pengaruh terhadap partisipasi

masyarakat dalam program pemerintah yaitu pembuatan Akta kematian. Di Kecamatan Cipeundeuy, status sosial ekonomi masyarakat tentunya sangat beragam dan belum terdapat penelitian yang meneliti dan menggali secara keseluruhan mengenai penelitian “Analisis Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cipeundeuy”. Karena itu dengan mengambil judul penelitian tersebut diharapkan dapat menemukan fakta dan solusi baru yang akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada Kecamatan Cipeundeuy.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berfokus pada ide, persepsi, pendapat, maupun keyakinan subjek yang diteliti. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian (Nasution, 2023). Pemilihan metode kualitatif dimaksudkan agar peneliti dapat mendalami secara lebih komprehensif bagaimana status sosial ekonomi berpengaruh terhadap aksesibilitas pelayanan publik. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi (Nasution, 2023). Pada tahap wawancara, informan dalam penelitian ini adalah staff pemerintah Kecamatan Cipeundeuy yaitu Kasi Pembedayaan Masyarakat Desa dan staff pelayanan public, serta

informan dari masyarakat Kecamatan Cipeundeuy yang berjumlah 6 orang.

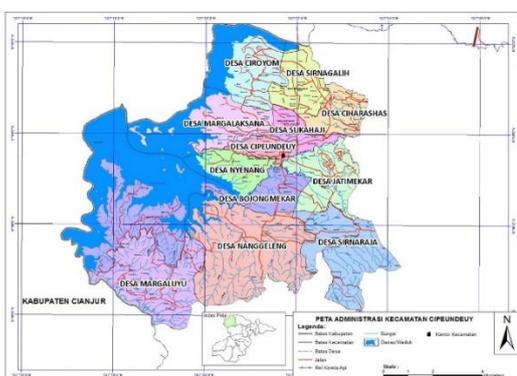
Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas melalui tiga tahap. Pertama, reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan data pada aspek penting berdasarkan teori status sosial ekonomi Harton dan Hunt (pendapatan, pekerjaan, dan pendidikan) untuk melihat pengaruhnya terhadap akses pelayanan publik di Kecamatan Cipeundeuy. Kedua, penyajian data, yakni mengorganisasi hasil reduksi dalam bentuk narasi, tabel, atau gambar agar sistematis dan mudah ditafsirkan. Ketiga, verifikasi data, yaitu penarikan kesimpulan yang didukung bukti valid dan konsisten sehingga hasil penelitian menjadi kredibel. (Nasution 2023).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori status sosial ekonomi yang diperkenalkan oleh Horton dan Hunt 1992. Teori ini mengidentifikasi tiga indikator utama status sosial ekonomi, yaitu pendapatan/kekayaan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan, yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kemampuan individu dalam mengakses pelayanan publik (Horton dan Hunt, 1992).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status sosial ekonomi adalah posisi atau tingkatan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh kemampuannya dalam mencukupi kebutuhan hidup

sehari-hari melalui penghasilan yang diperoleh. Selain itu, status ini juga dapat dilihat dari seberapa tinggi pencapaian yang diraih oleh individu, yang biasanya berkaitan dengan peran atau kedudukan yang dimilikinya dalam struktur sosial masyarakat (Suriyani, 2021).



Gambar 1. Peta Wilayah Kecamatan Cipeundeuy
Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan peta, Kecamatan Cipeundeuy memiliki wilayah yang luas yakni 101.11 km². Dalam hal ini, sebaran penduduk juga saling mendominasi di antara masing-masing desa. Penelitian ini akan menggunakan tiga indikator untuk dipakai sebagai alat analisis. Ketiga indikator tersebut adalah pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan.

1. Peran Pendapatan dalam Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cipeundeuy

Dalam semua lingkup kehidupan baik di perkotaan maupun di pedesaan tingkat pendapatan yang dihasilkan

seseorang tentunya sangat beragam tergantung dari pekerjaan apa yang mereka lakukan. Pendapatan atau penghasilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha. Pendapatan memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi pelayanan publik. Secara umum, pendapatan yang cukup memungkinkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam masyarakat dan meningkatkan kesenjangan sosial.

Ketidaksetaraan dalam pendapatan dapat menjadi faktor kritis yang mempengaruhi kemampuan individu untuk mengakses layanan publik. Individu dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi kendala finansial dalam membayar biaya terkait, seperti biaya kesehatan atau pendidikan. Kesulitan ini dapat menjadi hambatan utama, membatasi akses mereka terhadap layanan yang seharusnya tersedia untuk semua warga. Aksesibilitas juga terkait dengan kemampuan untuk mengakses lokasi layanan. Orang dengan pendapatan rendah mungkin kesulitan membayar transportasi atau tinggal di daerah yang jauh dari

pusat layanan. Informasi tentang layanan publik juga dapat menjadi sulit diakses oleh mereka dengan pendapatan rendah, karena mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap sumber informasi.

Dalam konteks peran pendapatan pada aksesibilitas pelayanan publik di Kecamatan Cipeundeuy, dengan tingkat perekonomian di wilayah tersebut yang masih berada di tengah-tengah artinya masih terdapat masyarakat yang mampu dan kurang mampu. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa masyarakat yang memang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dapat mengakses pelayanan, seperti pelayanan di Kantor Kecamatan Cipeundeuy, namun terkadang mengalami kesulitan apabila membutuhkan sejumlah biaya yang cukup besar untuk akses ke pelayanan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan. Sedangkan jika melihat geografis wilayah, terdapat desa di wilayah Kecamatan Cipeundeuy yang jaraknya jauh dari pusat kecamatan. Beberapa kondisi jalan memang cukup baik, namun dengan kontur yang mengikuti perbukitan yakni berkelok, ini dapat dikatakan akan mempengaruhi akses masyarakat menuju kantor kecamatan atau kepada pelayanan Puskesmas. Selain itu, rata-rata masyarakat juga sudah mempunyai kendaraan roda dua ataupun empat.

Ini menunjukkan bahwa pendapatan tidak mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cipeundeuy. Bersumber dari pegawai kecamatan yang mengucapkan jika pelayanan publik di Kecamatan Cipeundeuy dapat diakses secara gratis, ini memungkinkan keleluasaan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik di kecamatan.

2. Peran Pekerjaan dalam Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cipeundeuy

Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga merupakan bagian integral dari identitas dan kesejahteraan individu. Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan yang diperlukan, dan kondisi kerja dapat memengaruhi kesejahteraan seseorang. Pekerjaan merujuk pada aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat memperoleh pendapatan. Jika seseorang terlibat dalam suatu jenis pekerjaan secara berkelanjutan, hal ini disebut sebagai karir. Dalam kehidupan pedesaan tentunya karir ini dianggap sebagai sesuatu yang bernilai tinggi dan mengacu jika karir adalah suatu pekerjaan yang menempati jabatan tinggi. Hal tersebut dikarenakan rata-rata dari pekerjaan masyarakat pedesaan adalah petani, yang mana pendapatan bersumber dari hasil pertanian yang mereka lakukan.

Oleh karena itu, kesenjangan sosial juga tak luput dari daerah pedesaan.

Pekerjaan rata-rata warga masyarakat Kecamatan Cipeundeuy dilihat dari Kartu Keluarga dan berdasar pada data dari Badan Statistik tahun 2015-2022 adalah buruh harian lepas mencapai 36,29% dan rata-rata bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi walaupun buruh harian lepas menjadi rata-rata pekerjaan di Cipeundeuy, pekerjaan lainnya juga turut hadir dalam menyumbang pertumbuhan perekonomian di Cipeundeuy yaitu diantaranya pengusaha (barang ataupun jasa), nelayan, PNS, honorer, dan karyawan swasta. Dari semua pekerjaan tersebut tentunya ada yang berpengaruh dan ada juga yang tidak terhadap pengaksesan masyarakat ke pelayanan publik.

Tingkat stabilitas dan jadwal kerja dapat menjadi faktor penentu dalam sejauh mana seseorang dapat mengakses layanan publik. Jadwal kerja yang padat dan tidak teratur dapat menjadi hambatan bagi mereka yang kesulitan menyisihkan waktu untuk mengakses layanan publik yang mungkin hanya tersedia pada jam kerja konvensional. Seperti contohnya karyawan swasta yang bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ini akan sedikit menghambat akses mereka ketika membutuhkan pelayanan publik di Kecamatan Cipeundeuy

karena seperti yang diketahui bahwa kecamatan hanya buka pada hari Senin sampai dengan Jumat.

Jika melihat rata-rata pekerjaan yaitu buruh harian lepas yang mempunyai fleksibilitas waktu yang cukup baik, maka dalam hal ini pekerjaan tidak mempengaruhi akses masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan Cipeundeuy. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa pembuatan sesuatu yang membutuhkan pelayanan kecamatan bisa saja diwakilkan oleh anggota keluarga yang tidak berhalangan, kecuali yang membutuhkan data-data yang langsung seperti pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena membutuhkan perekaman foto, tandatangan, sidik jari, dan juga rekam retina mata.

3. Peran Tingkat Pendidikan dalam Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kecamatan Cipeundeuy

Pendidikan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, karena dapat membentuk pandangan dunia, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Pendidikan tidak hanya memberikan dasar pengetahuan akademis, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter, etika, dan nilai-nilai individu. Seseorang yang mendapatkan pendidikan yang baik memiliki peluang yang lebih besar

untuk meraih kesuksesan dalam karir dan kehidupan secara umum.

Pentingnya pendidikan juga dapat dirasakan dalam konteks pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang baik dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokratis, menyumbangkan ide-ide konstruktif, dan lebih mudah memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Termasuk juga ketika tingkat pendidikan seseorang dapat memengaruhi pemahaman mereka terhadap layanan yang tersedia, kemampuan mereka untuk mengakses informasi, dan juga keterampilan mereka dalam memanfaatkan layanan tersebut. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin lebih cenderung memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang berbagai layanan publik yang tersedia dan cara mengaksesnya. Mereka juga dapat memiliki keterampilan komunikasi dan literasi yang lebih baik, memudahkan mereka untuk memahami petunjuk, formulir, atau informasi terkait layanan.

Dalam mengakses pelayanan publik, tentu pemahaman masyarakat sangat berpengaruh ketika mereka mengakses pelayanan publik, termasuk mengakses pelayanan publik di Kantor Kecamatan Cipeundeuy. Rata-rata pendidikan terakhir masyarakat

Kecamatan Cipeundeuy berdasarkan hasil wawancara bersama Kasi Pembedayaan Masyarakat Desa adalah di tingkat SMA, hal ini memungkinkan kemudahan bagi mereka dalam memahami segala persyaratan dan bagaimana proses pelayanan publik harus berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Walaupun begitu, dari hasil wawancara bersama masyarakat ditemukan bahwa masih ada pihak-pihak yang membuat KTP atau surat kependudukan yang menggunakan alat pembantu (calo ataupun uang) dalam kelancaran proses pelayanan. Dampaknya adalah masyarakat akan menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada Pasal 79A proses pembuatan tersebut tidak dipungut biaya. Dan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada Pasal 13 ayat (3) disebutkan bahwa penyelenggara layanan tidak boleh menambah beban bagi masyarakat, maksudnya adalah tidak memberikan tambahan biaya, prosedur yang berbelit, waktu penyelesaian yang lebih lama, atau hambatan akses. Berangkat dari fenomena tersebut tentunya tingkat pendidikan tidak memberikan dampak yang langsung terhadap bagaimana masyarakat mengakses pelayanan publik. Namun, dengan

aadanya normalisasi “Calo atau uang pelicin” hal tersebutlah yang dapat menghambat akses ke pelayanan bagi beberapa masyarakat.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut dapat terlihat bahwa pendapatan, pekerjaan dan tingkat pendidikan sebenarnya tidak mempengaruhi langsung, akan tetapi faktor pengetahuan dan pemahaman masyarakatlah yang mempengaruhi proses aksesibilitas masyarakat ke layanan publik.

Faktor Pengetahuan

Faktor pengetahuan ini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi, keterampilan, dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Perlu di catat bahwa tidak semua pengetahuan berasal dan digapai dengan menjalani pendidikan formal. Pada hakikatnya, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia dari berbagai sumber. Pengetahuan menjadi bagian penting dalam keberadaan manusia, sebab lahir dari hasil serta aktivitas berpikir yang dilakukan oleh manusia. (Octaviana & Ramadhani, 2021).

Hasil dari aktivitas berfikir manusia bisa didapatkan melalui pendidikan formal dan non-formal, atau yang tidak terstruktur lainnya seperti berasal dari pengalaman. Dari fakta tersebut, seseorang tidak bisa dikatakan tidak memiliki pengetahuan hanya karena tidak bersekolah atau tidak menempuh

pendidikan yang tinggi. Tingkat literasi informasi di kalangan masyarakat juga menjadi landasan utama yang mempengaruhi kemampuan individu untuk mencari, memahami, dan menggunakan informasi terkait pelayanan publik. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang prosedur, kebijakan, dan hak-hak mereka akan cenderung lebih mampu memanfaatkan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Aksesibilitas pelayanan publik bertujuan memastikan layanan yang memadai, mudah diakses, dan nyaman sesuai prinsip efisiensi dan inklusivitas. Kondisi perekonomian yang beragam di Kecamatan Cipeundeuy tidak secara signifikan memengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada indikator pendapatan meskipun terdapat disparitas, ternyata tidak mempengaruhi aksesibilitas masyarakat kepada pelayanan publik di Kecamatan. Baik masyarakat mampu maupun kurang mampu masih dapat mengakses layanan publik dengan relatif mudah, meskipun terkadang menggunakan alat pembantu seperti uang atau calo. Pada indikator pekerjaan, karena melihat rata-rata pekerjaan adalah buruh harian lepas yang mana memiliki fleksibilitas waktu kerja yang baik tidak pula mempengaruhi akses masyarakat kepada pelayanan publik di Kecamatan. Terakhir pada indikator tingkat pendidikan, tinggi rendahnya tingkat

pendidikan tidak selalu mencerminkan kemampuan seseorang dalam mengakses pelayanan publik, terutama di Kecamatan Cipeundeuy yang cenderung menganggap wajar adanya calo. Berangkat dari fenomena tersebut tentunya tingkat pendidikan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap bagaimana masyarakat mengakses pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendapatan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan tidak secara signifikan dapat mempengaruhi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Akan tetapi faktor pengetahuan yang sebenarnya dapat mempengaruhi masyarakat, dalam konteks ini pada pemahamannya dalam mengakses pelayanan di Kecamatan Cipeundeuy.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Tentang Statistik Daerah Kecamatan Cipeundeuy Dalam Angka 2015

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat Tentang Statistik Daerah Kecamatan Cipeundeuy Dalam Angka 2022

Gischa, S. (2023). Pengertian Aksesibilitas Menurut Ahli. Kompas.com.

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/29/120000069/pengertian-aksesibilitas-menurut-ahli?page=all>

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV Harva Creative.

Octaviana, D. L. & Ramadhani, R. A. (2021). HAKIKAT MANUSIA: Pengetahuan (Knowledge), Ilmu Pengetahuan (Sains), Filsafat Dan Agama. *Jurnal Tawadhu*, Vol.5 no. 2

Paul, B. Horton and L. Hun Chester. *Sosiologi* (alih bahasa Aminuddin Ram). Jakarta: Erlangga, 1992.

Pramashela, F. S., & Rachim, H. A. (2022). Aksesibilitas Pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 225–232.

<https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>

Putra, M. B. (2020). Mengenal Pelayanan publik. *Berita - Ombudsman RI*. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>

Sari, M. E. P. (2018). Peran Pemerintah Dalam Penyediaan Akses Pelayanan Publik. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 1-12.

Soeroso, A. (2008). *Sosiologi 2*. Jakarta: Quadra.

Sundari, A'yuni, D. S., Prahara, R. S. (2023). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Talok, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 6(4), 773-788.

<https://doi.org/10.31538/almada.v6i4.4478>

Suriyani, E. (2021). Analisis Pengaruh status Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam program Pembuatan Akta Kematian di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/12246>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan